

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi

Fatimah Purwitasari Harahap¹·Candra Sigalingging²
Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka¹
Tutor Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka²
fatimahpurwitasarih@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menelaah sistem informasi akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi. Sistem penggajian yang diaplikasikan adalah aplikasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat (GPP), dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang telah beralih dari berbasis desktop ke berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Pendekatan deskriptif kualitatif diaplikasikan dalam penelitian ini, dengan data primer akurat berdasarkan wawancara secara komprehensif dan observasi langsung, serta data sekunder berdasarkan dokumen-dokumen yang terkait. Hasil penelitian mengatakan sistem informasi akuntansi penggajian di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta secara umum berjalan dengan baik. Aplikasi GPP berbasis web mempermudah proses pengelolaan gaji, termasuk rekapitulasi gaji, uang makan, dan uang lembur. Dokumen seperti Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Setoran Pajak (SSP) juga dihasilkan dengan lebih cepat dan akurat. Proses pencairan dana yang diotorisasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menambah keamanan dan akuntabilitas. Namun, ditemukan beberapa kendala seperti integrasi data serta operator pengelola gaji yang belum optimal dalam mengoperasikan sistem. Rekomendasi mencakup peningkatan pelatihan dan dukungan teknis untuk pegawai, serta pengembangan integrasi sistem yang lebih baik.

Kata kunci: aplikasi gpp, pegawai negeri sipil, penggajian, sistem informasi akuntansi

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dari teknologi informasi sangat membuka peluang yang luas dalam hal mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat. Fenomena ini menggambarkan bahwa penggunaan media elektronik menyanggah peran yang vital dalam berbagai proses transaksi. Kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan tren global ini

dapat mengakibatkan suatu negara terjerebab ke dalam jurang *digital divide*, yang berarti terisolasi dari perkembangan global karena kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan informasi. Oleh karena itu, upaya reformasi birokrasi yang sedang kita lakukan saat ini haruslah diarahkan untuk mendorong Indonesia menuju masyarakat yang berbasis informasi.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem yang menyediakan informasi terkait akuntansi, keuangan, dan informasi lainnya yang dihasilkan dari proses rutin transaksi akuntansi. SIA mampu memberikan *output* berupa informasi akuntansi yang berguna untuk mendukung kegiatan rutin, mengambil keputusan manajemen, perencanaan dan pengendalian, serta menerapkan pengendalian internal. SIA ini menggunakan aplikasi atau perangkat lunak akuntansi untuk mengelola informasi, yang biasanya diorganisir berdasarkan siklus transaksi. Sebagai contoh, aplikasi siklus penggajian membantu pengguna dalam menghitung gaji karyawan berdasarkan jam kerja mereka.

Keluarnya paket Undang-Undang terkait keuangan negara dan inisiatif e-government dapat dianggap sebagai upaya awal dalam melakukan reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden mengenai kebijakan dan program nasional terkait pengembangan *e-government* memperkuat pengaplikasian teknologi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan menargetkan untuk menambah tingkat efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan, terutama pada manajemen keuangan negara. Pengembangan *e-government* merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang berbasis elektronik guna memajukan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien. Adanya pengembangan e-government dilaksanakan pembenahan sistem manajemen dan aktivitas kerja di lingkup pemerintahan dengan mengaplikasikan teknologi informasi secara maksimum.

Menurut Ndraha (2003:6), peran pemerintahan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola pelayanan publik dan memberikan layanan sipil kepada setiap individu melalui lembaga pemerintah sangatlah penting. Hal ini memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk menerima layanan tersebut saat dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintahan wajib

memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan. Wasistiono (2003:41) mengungkapkan bahwa salah satu tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga pemerintah sering disebut sebagai Pelayan Masyarakat atau *Public Servant*. Selain itu, ia menekankan bahwa sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam instansi pemerintah, dan tanpa mereka, instansi pemerintah tidak akan dapat melayani masyarakat. Peran sumber daya manusia di instansi pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang menetapkan definisi dan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) serta hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Sistem pengelolaan gaji pegawai merupakan suatu kebutuhan yang sangat substansial, karena informasi terkait penggajian dan perhitungan gaji serta tunjangan yang diterima oleh pegawai setiap bulan sangatlah vital. Sistem penggajian yang efektif dapat meningkatkan kinerja instansi dan kesejahteraan pegawai. Besaran gaji yang diterima setiap pegawai bervariasi tergantung pada posisi dan jabatan yang mereka emban di dalam instansi tersebut.

Sebelumnya, SIA Penggajian UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta telah dijalankan secara komputerisasi menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP). Namun, kelemahan dari aplikasi ini adalah sifatnya yang berbasis desktop, sehingga tidak terintegrasi secara langsung dengan aplikasi keuangan lain yang sudah berbasis web. Selain itu, seringkali terjadi pembaharuan sistem secara nasional yang dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu yang lama dan menghambat proses perhitungan gaji dan tunjangan.

Oleh karena itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Aplikasi GPP berbasis Web dengan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dengan Menggunakan Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web. Adanya aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem penggajian di seluruh satuan kerja, termasuk UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memahami sistem informasi akuntansi yang digunakan dan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi sistem penggajian yang ada di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai struktur, proses, dan efektivitas sistem informasi yang digunakan. Lokasi penelitian ini terletak di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi. Subjek penelitian meliputi pegawai yang terlibat dalam proses penggajian, termasuk bagian keuangan, administrasi, dan teknologi informasi. Selain itu, juga akan melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi dan pemeliharaan sistem informasi akuntansi penggajian.

Data yang terdapat pada penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer: Data primer didapatkan dengan wawancara mendalam bersama pegawai dan staf yang terlibat dalam proses penggajian. Observasi langsung terhadap proses penggajian juga diterapkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai alur kerja dan penggunaan sistem informasi akuntansi penggajian.
- b. Data Sekunder: Data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen terkait seperti laporan keuangan, manual penggunaan aplikasi GPP, laporan audit internal, dan regulasi yang mengatur sistem penggajian PNS. Literatur dan penelitian terdahulu juga digunakan sebagai referensi.

Teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu wawancara: Wawancara dilakukan dengan pegawai yang terlibat langsung dalam proses penggajian untuk mendapatkan informasi mendetail mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan sistem informasi akuntansi penggajian. Pertanyaan yang diajukan meliputi aspek teknis, prosedural, dan kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem. Langkah yang kedua yaitu observasi: Observasi dilakukan dengan memantau langsung proses penggajian di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Hal ini bertujuan untuk memahami secara nyata bagaimana sistem informasi akuntansi penggajian digunakan dalam operasional sehari-hari. Langkah yang terakhir

yang digunakan yaitu studi dokumentasi: Studi dokumentasi diterapkan dengan menyatukan dan menelaah dokumen-dokumen sistem penggajian. Dokumen-dokumen ini termasuk rekapan gaji, surat perintah pembayaran, dan laporan-laporan keuangan lainnya.

Dengan metode penelitian yang terstruktur ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sistem informasi akuntansi penggajian di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk menambah tingkat efisiensi dan efektivitas sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Sistem Akuntansi Informasi Penggajian di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

1. Jenis Penggajian

Penggajian dalam PNS tidak hanya berupa gaji pokok saja, namun juga berupa tunjangan-tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan uang makan, dan beberapa tambahan seperti uang lembur. Proses antara gaji dan tunjangan hampir sama, namun ada sedikit perbedaan.

2. Proses *input*

Sebelum membahas lebih lanjut tentang proses penggajian, perlu diketahui bahwa UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta menggunakan aplikasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat (GPP) untuk perhitungan gaji. Menurut Yunizar (2015), aplikasi ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk membuat daftar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat. Pada tahun-tahun sebelumnya, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta telah menggunakan aplikasi ini. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, aplikasi yang sebelumnya berbasis desktop kini telah diubah menjadi berbasis web, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses dan mengoperasikan sistem penggajian. Proses pertama pada saat melakukan prosedur penggajian dimulai dari proses *input*. Proses ini dengan memasukkan data-data dari kepegawaian ke dalam sistem Aplikasi Gaji PNS (GPP) Pusat berbasis web. Data dari

3. Proses

Setiap pemrosesan sistem akuntansi penggajian melibatkan beberapa pihak. Pihak yang terkait yaitu PPABP (Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai), Bendahara, PPK dan PPSPM. Aktivitas pemrosesan data dimulai dari perhitungan gaji dan tunjangan lainnya oleh PPABP. Setelah dilakukan perhitungan dan disetujui oleh PPABP, kemudian PPABP melalui aplikasi Gaji Pusat PNS berbasis web mengirimkan data gaji dan tunjangan tersebut kepada Bendahara. Kemudian bendahara memverifikasi data tersebut apakah perhitungan gaji dan tunjangan sudah sesuai. Jika sudah sesuai maka Bendahara mengirimkan langsung data tersebut ke PPK untuk dilakukan pengujian. PPK kemudian memverifikasi serta melakukan pengujian terhadap perhitungan gaji dan tunjangan. Jika ternyata terdapat ketidaksesuaian, maka PPK berhak mengembalikan perhitungan gaji dan tunjangan tersebut kepada PPABP untuk dikoreksi kembali. Namun, jika data perhitungan gaji dan tunjangan sudah sesuai maka PPK melakukan persetujuan dan mengirimkan data tersebut kepada PPSPM untuk diverifikasi.

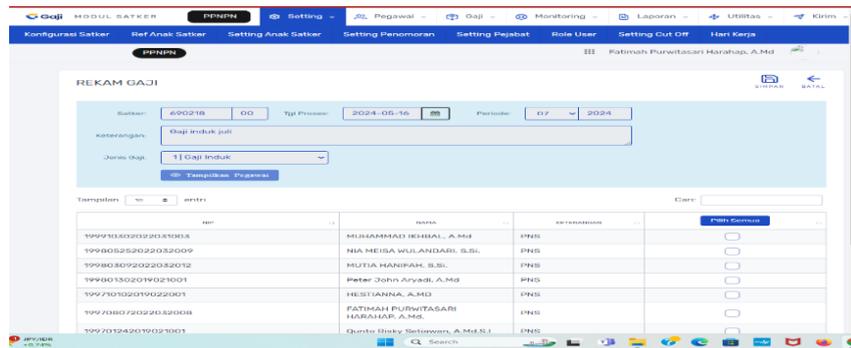
PPSPM selaku pihak yang akan menguji terhadap data perhitungan gaji dan tunjangan harus melakukan verifikasi secara teliti dan benar agar tidak terjadi kesalahan pada saat mengirimkan data ke KPPN. Jika terdapat perubahan data pegawai seperti Kenaikan Gaji Berkala atau Kenaikan Pangkat, maka PPSPM secara otomatis akan menerbitkan laporan perubahan data pegawai sesuai dengan SK yang telah diterbitkan. Kemudian setelah PPSPM memverifikasi dan menyetujui perhitungan gaji dan tunjangan, PPSPM mengirimkan data tersebut kepada KPPN selaku pihak yang mencairkan gaji dan tunjangan tersebut.

Kemudian KPPN menerima data perhitungan gaji dan tunjangan dari satker, lalu melakukan rekonsiliasi dan persetujuan dari data tersebut. KPPN akan memberitahukan jika data perhitungan gaji dan tunjangan tersebut sudah sesuai dan siap untuk dilakukan proses pembayaran.

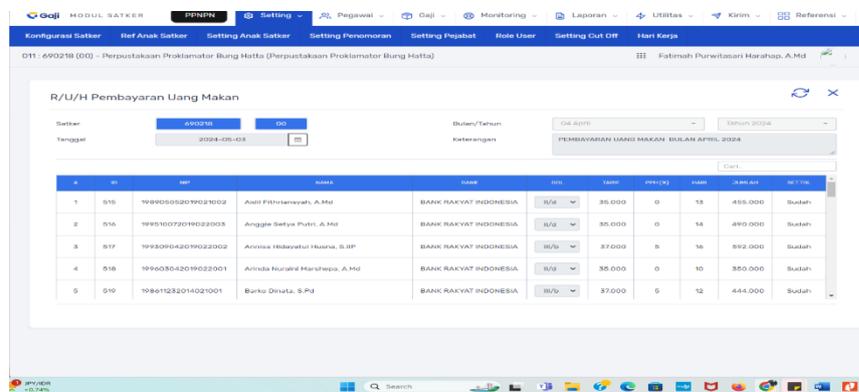
Setelah mendapat pemberitahuan bahwa data perhitungan gaji dan tunjangan sudah disetujui, maka data gaji dan tunjangan tersebut secara otomatis akan masuk ke dalam aplikasi SAKTI untuk segera diproses. Namun hal itu hanya berlaku pada data gaji saja. Pada proses pembayaran untuk uang

makan dan uang lembur, PPABP perlu mengirimkan data perhitungan uang makan dan uang lembur secara manual kepada operator SPM.

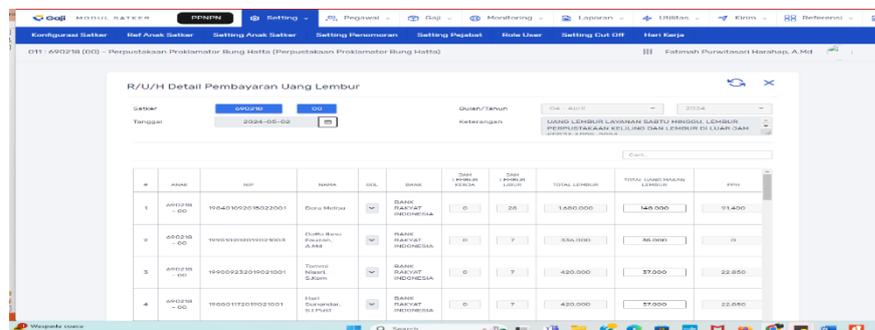
Operator menerima data perhitungan gaji dan tunjangan kemudian memproses data tersebut di aplikasi SAKTI. Pada saat proses pembayaran gaji, operator SPM tidak perlu memasukkan data gaji secara manual. Namun, untuk pemrosesan uang makan dan uang lembur, operator SPM perlu memasukkan data dengan ekstensi .gpp secara manual agar dapat melakukan proses pembayaran. Gambaran proses perhitungan gaji dan tunjangan :



Gambar 3. Proses perhitungan



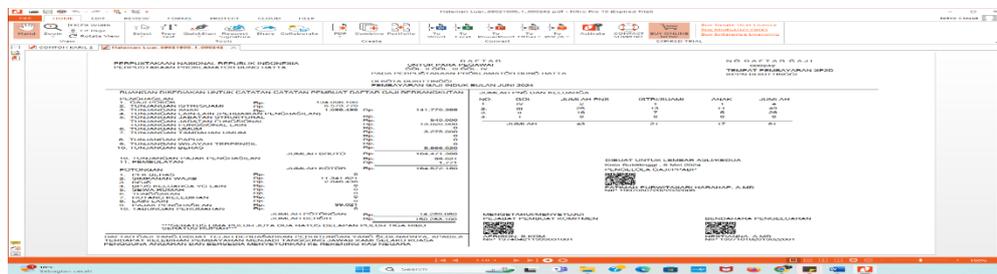
Gambar 4. Proses perhitungan



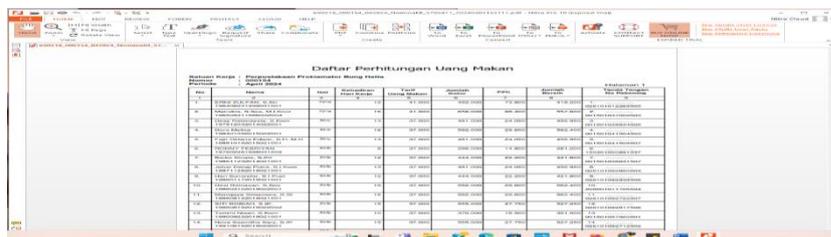
Gambar 5. Proses perhitungan

4. Output

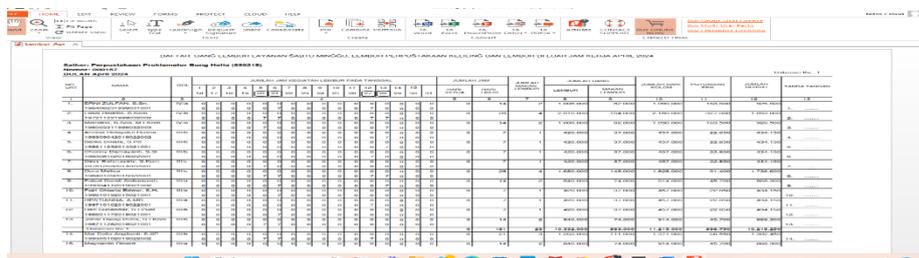
Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang berfungsi mengakumulasi data yang menggambarkan aktivitas organisasi, mengolah beberapa data menjadi informasi, serta menyajikan informasi bagi pengguna baik di dalam maupun di luar organisasi. Beberapa keluaran dari sistem informasi akuntansi penggajian meliputi rekapitulasi gaji, rekapitulasi uang makan, rekapitulasi uang lembur, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Setoran Pajak (SSP). Proses pencairan dana diotorisasi langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). *Output* yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 6. Dokumen gaji



Gambar 7. Dokumen uang makan



Gambar 8. Dokumen uang lembur

Pengelola gaji menerima SK dari bagian kepegawaian, kemudian memasukkan SK tersebut ke dalam aplikasi GPP. SK tersebut sebagai dasar dalam perhitungan gaji. PPABP sebagai operator aplikasi GPP menghitung gaji beserta tunjangannya seperti uang makan dan uang lembur.

3. Role Bendahara

Bendahara menerima data gaji dan tunjangan dari pengelola gaji melalui aplikasi GPP. Kemudian bendahara memeriksa data tersebut, jika sesuai maka bendahara meverifikasi dan menyetujui data tersebut, kemudian mengirim data tersebut ke penguji, yaitu PPK dan PPSPM.

4. Role PPK

PPK menerima data dari Bendahara, kemudian memeriksa data tersebut. Kemudian memverifikasi dan menyetujui data tersebut.

5. Role PPSPM

PPSPM menerima data dari Bendahara, kemudian memverifikasi dan menyetujui data tersebut. Jika sudah sesuai maka PPSPM mengirim data tersebut ke KPPN.

6. Role Operator Pembayaran

Data gaji dan tunjangan jika sudah melalui proses rekonsiliasi KPPN maka akan masuk ke dalam aplikasi SAKTI secara otomatis. Kemudian operator pembayaran dapat memproses pembayaran gaji dan tunjangan di aplikasi SAKTI

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

Bersumber pada data rangkaian wawancara dan studi pustaka, penulis akan menganalisis sistem informasi akuntansi penggajian. Dari analisis fungsi yang terkait, ditemukan bahwa tidak ada fungsi yang merangkap beberapa tugas di semua bagian. Setiap fungsi telah menjalankan tugas sesuai berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Sistem otorisasi juga diterapkan dengan baik di setiap bagian, kecuali untuk proses pencairan dana yang otorisasinya dilakukan oleh lembaga lain, yaitu KPPN.

Dokumen yang digunakan oleh UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta untuk penggajian meliputi Surat Keputusan (SK), Daftar Gaji, Daftar Perubahan Data Pegawai, Rekap Gaji, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM). Sementara itu,

dokumen yang digunakan untuk pembayaran tunjangan uang makan dan uang lembur mencakup Daftar Hadir Pegawai, Rekap Uang Makan/Uang Lembur, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM). Penggunaan dokumen-dokumen ini memiliki tujuan untuk mencegah adanya kesalahan dalam pelaksanaan pembayaran serta berfungsi sebagai bukti saat evaluasi atau audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semua dokumen yang dihasilkan dalam proses penggajian diarsipkan secara rapi dalam bentuk softfile dan hardfile.

Analisis prosedur sistem informasi akuntansi penggajian di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, yang mencakup pembuatan dan pembayaran gaji, menunjukkan bahwa proses ini sudah dilakukan dengan tepat dan akurat. Sistem penggajian yang mengaplikasikan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) berbasis web sangat memudahkan pengelolaan gaji dan tunjangan. Aplikasi ini mampu merekam dan menyimpan semua data, baik data yang sudah lama maupun data yang masih baru, dan terintegrasi dengan aplikasi SAKTI, sehingga proses perhitungan hingga pencairan dapat dilakukan secara online. Selain itu, KPPN dapat mengakses data secara real-time.

Namun, proses pembayaran uang makan dan uang lembur masih menggunakan sistem manual. Pada proses ini, PPABP harus mengirimkan data dan dokumen kepada operator pembayaran untuk diproses di aplikasi SAKTI, karena tidak ada proses rekonsiliasi dari KPPN seperti pada pembayaran gaji. Perbedaan dalam proses pembayaran gaji dan tunjangan ini menyebabkan prosedur pembayaran untuk keduanya tidak sama.

Menurut Romney (2016:10), Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat berfungsi baik secara manual maupun dengan teknologi informasi mutakhir. SIA diharapkan mampu mengumpulkan, memasukkan, mengolah, menyimpan, dan melaporkan data serta informasi yang relevan. Komponen-komponen dalam SIA melibatkan pengguna sistem, prosedur dan instruksi untuk mengelola proses pengumpulan dan pengolahan data, perangkat lunak untuk memproses data, infrastruktur teknologi informasi seperti perangkat keras, serta perlindungan keamanan untuk menjaga integritas sistem.

Penelitian ini sesuai dengan teori Romney, karena sistem akuntansi penggajian yang diterapkan di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta telah mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam teori tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian di yaitu :

1. Sistem penggajian di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) berbasis web untuk mengelola gaji dan tunjangan. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan kementerian keuangan yang mewajibkan satuan kerja di seluruh Indonesia menggunakan sistem aplikasi Gaji PNS Pusat berbasis web.
2. Terdapat kendala dalam pembayaran komponen tertentu secara manual, misalnya proses pembayaran uang makan dan uang lembur masih dilakukan secara manual, mengakibatkan perbedaan prosedur dengan pembayaran gaji utama. Integrasi sistem yang ada dengan aplikasi SAKTI memungkinkan proses penggajian lebih efisien.

Beberapa saran dari penulis yaitu :

1. Peningkatan Integrasi Sistem
Perluasan integrasi antara aplikasi GPP berbasis web dengan aplikasi SAKTI untuk mencakup semua komponen pembayaran, termasuk uang makan dan uang lembur. Ini akan mengurangi proses manual dan meningkatkan efisiensi.
2. Pelatihan dan Pengembangan SDM
Penyediaan pelatihan berkala bagi petugas pengelola gaji untuk memastikan mereka selalu terupdate dengan perkembangan teknologi dan sistem terbaru.

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan dan sistem penggajian di instansi pemerintah, termasuk UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung reformasi birokrasi yang sedang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Fiantika, Feny Rita., Wasil, Mohammad., Jumiyati, Sri,, Honesti, Leli., Wahyuni, Sri., Mouw, Erland., Jonata., Mashudi, Imam., Hasanah, Nur., Maharani, Anita., Ambarwati, Kusmayra., Noflidaputri, Resty., Nuryami., Waris, Lukman. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Gaffar, M. I. (2023). Analisis sistem informasi akuntansi penggajian pegawai negeri sipil pada universitas negeri gorontalo. *Jambora accounting review*. 4(1): 159-173.
- Gaol, Y. M. J. L. (2023). Sistem informasi akuntansi. *Circle Archive Ekonomi*, 1(1). 2-3.
- Ghozali, Z., Irsan, & Vitalia, R. (2019). Analisis penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada balai konservasi sumber daya alam sumatera selatan. *Jurnal ekobis : Kajian ekonomi dan bisnis*. 2(2): 78 – 91.
- Liliani, N. & Yudiantara, I. Penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pegawai asn dan non asn pada badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten buleleng. *Jurnal ilmiah akuntansi dan humanika*. 12(1): 22-32
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan publik: Pelayanan terpadu administrasi kecamatan*. Indra Prahasta.
- Mulyadi. (2001). *Sistem akuntansi : Edisi ketiga*. Salemba Empat.
- Mulyanto, Agus. (2009). *Sistem informasi konsep dan aplikasi*. Pustaka Pelajar
- Soeradi. (2017). *Akuntansi pemerintah berbasis akrual : Era baru akuntansi dan pelaporan keuangan dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN)*. Expert.
- Susan, E. Manajemen sumber daya manusia. *Jurnal manajemen pendidikan islam*. 9(2): 952-962
- Situmorang, Dokman Marulitua, & Cahyani, Anggun. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Pt Pelindo Regional 3 (PERSERO). *SURPLUS: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 115–120. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>
- TMBooks. (2014). *Sistem informasi akuntansi: Konsep dan penerapan*. Andi.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/1tahun2004uu.htm>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. <https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf>